



RENCANA KERJA

TAHUN 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka disusunlah Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang merupakan ikhtisar Rencana Kerja yang akan dicapai selama Tahun 2026. Rencana Kerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar pedoman dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2026.

Diharapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 ini mampu dijadikan acuan untuk perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kami menyadari Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2026 ini dapat dijadikan arah di dalam melaksanakan seluruh Program/Kegiatan serta mampu memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi guna mewujudkan “*good governance*” di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal: Juni 2026

KEPALA DINAS,

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660105 200012 1 002



	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2024	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2024 dan Capaian Prioritas RENSTRA DLH Prov. Jambi Tahun 2024	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	74
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	76
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	78
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	107
III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN	108
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	108
3.2. Tujuan dan Sasaran	114
3.3. Program dan Kegiatan	118
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	146
V PENUTUP	164



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD DLH TA 2024 10
Tabel 2	Anggaran Pendapatan Dan Belanja DLH TA 2024 21
Tabel 3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA OPD dan Pencapaian RENSTRA DLH Provinsi Jambi s/d Tahun 2024 58
Tabel 4	Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 75
Tabel 5	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Urusan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 75
Tabel 6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Jambi 80
Tabel 7	Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2026 116
Tabel 8	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 beserta Proyeksi Maju Tahun 2027 Provinsi Jambi 122
Tabel 9	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2026 147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (RENJA) SKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

RENJA PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). RENJA SKPD memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan utama masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disebut RKPD Provinsi Jambi serta pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi atau disebut DLH Provinsi Jambi yang berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Serta dijabarkan uraian tugasnya dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 28

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi memiliki tugas sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup, perlu merumuskan dan menyusun Rencana Kerja SKPD guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang berbasis pada pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan hidup. Renja SKPD sebagaimana dimaksud merupakan hasil Musrenbang Provinsi Jambi, serta hasil pembahasan usulan program dan kegiatan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang disinergikan dengan mengacu pada program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra DLH Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dan merupakan kebijakan, indikator kinerja, kelompok sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra DLH Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja DLH Provinsi Jambi, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
 13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2026 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat tentang pengertian singkat Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2026 dan urgensi terhadap penyusunannya yang terdiri dari :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

B. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2024

Bab II memuat tentang narasi dan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH Provinsi Jambi Tahun 2024 dan capaian prioritas dan target program Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2024 serta isu strategis terkait kebijakan bidang lingkungan hidup dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Jambi.

C. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bab III memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan kebutuhan dana atau pembiayaan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2026.

D. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab IV memuat program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

E. BAB V PENUTUP

Bab V memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2026.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN PRIORITAS RENSTRA DLH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Tahun 2024

Dana APBD adalah sebesar Rp20.070.716.961,- (dua puluh milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp15.754.757.814,-
Belanja Pegawai	Rp15.754.757.814,-
b. Belanja Langsung	Rp4.315.959.147,-
Belanja Pegawai	Rp226.400.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp4.049.830.647,-
Belanja Modal	Rp39.728.500,-

Jumlah Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2024 sebesar Rp18.688.724.081,- dan jumlah anggaran setelah proses perubahan dan pergeseran, nilai APBD menjadi Rp20.070.716.961,-. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendapat tambahan anggaran sebesar Rp1.381.993.035,- untuk Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan. Subkegiatan yang mengalami pergeseran, antara lain :

- Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bertambah sebesar Rp5.728.430,-
- Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertambah sebesar Rp15.050.000,-
- Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan bertambah sebesar Rp15.094.857,-

- Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan bertambah sebesar Rp6.500.000,-
- Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya bertambah sebesar Rp39.728.500,-
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bertambah sebesar Rp3.000.000,-
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan bertambah sebesar Rp74.960.000,-
- Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya bertambah sebesar Rp 13.320.000,-
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *berkurang* sebesar Rp369.821.692,-
- Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *berkurang* sebesar Rp25.000.000,-

Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.070.716.961,- (dua puluh milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp15.981.157.814,- , belanja barang dan jasa sebesar Rp4.049.830.647,- dan belanja modal sebesar Rp39,728,500,-.

Selain mengelola dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi, pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi juga menghasilkan dana pendapatan sebagai Penerimaan Asli Daerah yang bersumber dari jasa analisa sampel Laboratorium DLH Provinsi Jambi. Target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.000.000.000,- dan realisasi per 31 Desember sebesar Rp2.098.266.600,- (209,83%).

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada Tahun 2024 tidak memperoleh Dana Dekonsentrasi/APBN.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp19.120.661.211,- (sembilan belas milyar seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah) atau 95,27% dengan sisa dana sebesar Rp950.055.750,- (sembilan ratus lima puluh juta lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Rincian realisasi sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung	Rp15.148.048.456,-
Belanja Pegawai	Rp15.148.048.456,-
b. Belanja Langsung	Rp3.972.612.755,-
Belanja Pegawai	Rp211.360.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp3.725.055.755,-
Belanja Modal	Rp36.197.000,-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.098.266.600,- (209,83%). Realisasi tahun 2024 ini sudah memenuhi target Rp1.000.000.000,-, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2023 yang penerimaannya sebesar Rp2.325.415.745,-.

Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.070.716.961,- (dua puluh milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) untuk mendanai 7 Program (1 program rutin dan 6 program urusan LH), 13 kegiatan (6 kegiatan rutin dan 7 kegiatan urusan LH), 30 subkegiatan (20 subkegiatan rutin dan 10 subkegiatan urusan LH).

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai berikut :

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

Tabel 1
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dana APBD Tahun Anggaran 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp)	APBD PERUBAHAN 2024 (Rp)	REALISASI APBD 2024			SISA ANGGARAN	FAKTOR PENYEBAB MASALAH
						Rp	% KEU	% FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	1. Predikat AKIP Perangkat Daerah (Opsional Nilai) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.688.724.081	20.070.716.961	19.120.661.211	95,27	95,27	14.829.874.887	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.688.724.081	20.070.716.961	19.120.661.211	95,27	95,27	14.829.874.887	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	18.688.724.081	20.070.716.961	19.120.661.211	95,27	95,27	14.829.874.887	
		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.592.724.081	17.974.716.961	17.252.321.045	95,98	95,98	722.395.916	
		I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.065.281	45.065.281	29.515.580	65,50	65,50	15.549.701	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.530.000	13.530.000	9.106.980	67,31	67,31	4.423.020	Tidak melakukan pergeseran anggaran untuk rekening belanja honorarium pengelolaan keuangan.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.500.000	4.500.000	4.200.000	93,33	93,33	300.000	
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.500.000	4.500.000	3.550.000	78,89	78,89	950.000	Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal).
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.452.000	15.452.000	7.228.600	46,78	46,78	8.223.400	1. Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal). 2. Tidak melakukan pergeseran anggaran untuk rekening belanja internet berlangganan.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

		5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.083.281	7.083.281	5.430.000	76,66	76,66	1.653.281	Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal).
		I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.388.874.779	15.770.867.814	15.151.048.456	22,55	22,55	619.819.358	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.372.764.779	15.754.757.814	15.148.048.456	96,15	96,15	606.709.358	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.110.000	16.110.000	3.000.000	18,62	18,62	13.110.000	Tidak melakukan pergeseran anggaran untuk rekening belanja honorarium pengelolaan keuangan.
		1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447.000.000	489.373.287	489.023.627	99,93	99,93	349.660	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	5.728.430	5.608.270	97,90	97,90	120.160	
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.000.000	72.000.000	71.973.500	99,96	99,96	26.500	
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	15.050.000	15.047.000	99,98	99,98	3.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	15.094.857	14.894.857	98,68	98,68	200.000	
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	6.500.000	6.500.000	100,00	100,00	0	
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.000.000	375.000.000	375.000.000	100,00	100,00	0	
		1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah	0	39.728.500	36.197.000	91,11	91,11	3.531.500	
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	39.728.500	36.197.000	91,11	91,11	3.531.500	
		1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.657.784.021	1.512.902.079	1.511.493.982	99,91	99,91	1.408.097	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	3.000.000	3.000.000	100	100	0	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	641.204.021	271.382.329	269.974.232	99,48	99,48	1.408.097	
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.016.580.000	1.238.519.750	1.238.519.750	100	100	0	
		1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.000.000	116.780.000	35.042.400	30,01	30,01	81.737.600	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000	92.960.000	11.742.400	12,63	12,63	81.217.600	Kesalahan teknis dalam sistem pencairan SIPD RI.
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	13.320.000	12.800.000	96,10	96,10	520.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

		3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.000.000	10.500.000	10.500.000	100,00	100,00	0	
Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	1. IKU 2. IKA 3. IKAL 4. IKEG	II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	550.000.000	550.000.000	521.133.286	94,75	94,75	28.866.714	
		II.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	550.000.000	550.000.000	521.133.286	94,75	94,75	28.866.714	
		1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	550.000.000	550.000.000	521.133.286	94,75	94,75	28.866.714	1. Perubahan jadwal pelaksanaan audit/surveilen ISO oleh pihak KAN ke bulan Januari 2025, dimana semula dijadwalkan pada bulan November atau Desember. 2. Selisih harga negosiasi dalam belanja bahan kimia dan belanja suku cadang alat laboratorium.
		III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	618.619.500	618.619.500	579.845.161	93,73	93,73	38.774.339	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

		III.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	618.619.500	618.619.500	579.845.161	93,73	93,73	38.774.339	
		1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	536.000.000	536.000.000	532.372.161	99,32	99,32	3.627.839	
		2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	5.350.000	5.350.000	4.970.000	92,90	92,90	380.000	
		3	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	77.269.500	77.269.500	42.503.000	55,01	55,01	34.766.500	Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal).
		IV	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	300.000.000	300.000.000	262.302.874	87,43	87,43	37.697.126	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

		IV.1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100.000.000	100.000.000	79.195.874	79,20	79,20	20.804.126	
		1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	100.000.000	100.000.000	79.195.874	79,20	79,20	20.804.126	Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga tim pelaksana tidak bisa menyelesaikan kegiatan di semua lokasi yang telah direncanakan.
		IV.2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	200.000.000	200.000.000	183.107.000	0	0	16.893.000	
		1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	200.000.000	200.000.000	183.107.000	91,55	91,55	16.893.000	
		V	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	210.000.000	210.000.000	201.925.165	96,15	96,15	8.074.835	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

		V.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	210.000.000	210.000.000	201.925.165	96,15	96,15	8.074.835	
		1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	210.000.000	210.000.000	201.925.165	96,15	96,15	8.074.835	
		VI	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	167.380.500	167.380.500	107.105.500	63,99	63,99	60.275.000	
		VI.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	167.380.500	167.380.500	107.105.500	63,99	63,99	60.275.000	
		1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	78.740.500	78.740.500	34.385.000	43,67	43,67	44.355.500	Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal).

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

		2	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	88.640.000	88.640.000	72.720.500	82,04	82,04	15.919.500	Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal).
		VII	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	250.000.000	250.000.000	196.028.180	78,41	78,41	53.971.820	
		VII.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	250.000.000	250.000.000	196.028.180	78,41	78,41	53.971.820	
		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	250.000.000	250.000.000	196.028.180	78,41	78,41	53.971.820	Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal).
				18.688.724.081	20.070.716.961	19.120.661.211	95,27	95,27	950.055.750	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DLH Provinsi Jambi, 2024, diolah

Realisasi anggaran masing-masing program pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini pada tahun 2024 disiapkan anggaran sebesar Rp17.974.716.961,- dan terealisasi sebesar Rp17.252.321.045,- atau sebesar 95,98%. Capaian output fisiknya 100%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi nilai) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2024 tidak memiliki anggaran. Capaian output fisiknya 75%.

c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2024 disiapkan anggaran sebesar Rp550.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp521.133.286,- atau sebesar 94,75%. Capaian output fisiknya 100%.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini pada tahun 2024 tidak memiliki anggaran.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp618.619.500,- dan mampu direalisasikan sebesar Rp579.845.161,- atau sebesar 93,73%. Capaian output fisiknya 100%.

f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Program ini pada tahun 2024 disiapkan anggaran sebesar Rp300.000.000,- dan mampu diserap sebesar Rp262.302.874,- atau sebesar 79,20%. Capaian output fisiknya 100%.

g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini pada tahun 2024 disiapkan anggaran sebesar Rp210.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp201.925.165,- atau sebesar 96,15%. Capaian output fisiknya 100%.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2024 disiapkan anggaran sebesar Rp167.380.500,- dan terealisasi sebesar Rp107.105.500,- atau sebesar 63,99%. Capaian output fisiknya 100%.

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini pada tahun 2024 disiapkan anggaran sebesar Rp250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp196.028.180,- atau sebesar 78,41%. Capaian output fisiknya 100%.

Seluruh program urusan lingkungan hidup selain program penunjang urusan pemerintah daerah, berkontribusi terhadap pencapaian nilai indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas ekosistem gambut.

Serapan anggaran dari 7 Program (1 program rutin dan 6 program urusan LH), 13 kegiatan (6 kegiatan rutin dan 7 kegiatan urusan LH), 30 subkegiatan (20 subkegiatan rutin dan 10 subkegiatan urusan LH) yang dilaksanakan Tahun 2024 bervariasi satu sama lainnya, hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap kegiatan berbeda-beda. Secara garis besar realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi TA. 2024 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
DLH PROVINSI TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
A	Pendapatan	1.000.000.000	2.084.725.100	208,47
B	Belanja	20.070.716.961	19.199.520.811	95,66
	1. Belanja tidak Langsung	15.754.757.814	15.148.048.456	96,15
	2. Belanja Langsung	4.315.959.147	4.051.472.355	93,87
C	Surplus / (Defisit)	(19.070.716.961)	(17.114.795.711)	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DLH Provinsi Jambi, 2024

Penjabaran dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

PROGRAM NON URUSAN

Program ini didukung alokasi anggaran Rp17.974.716.961,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.331.180.645,- (96,42%). Sebagian besar output kegiatan telah dilaksanakan hampir 100%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki 7 Kegiatan dan 24 subkegiatan (termasuk penyediaan gaji dan tunjangan) yang terdiri atas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan ke luar organisasi. Program ini memiliki 7 indikator kinerja pada setiap kegiatan. 1 indikator melebihi target realisasi yaitu Predikat AKIP sebesar 80,26. 6 indikator kinerja realisasinya tercapai.

Indikator kinerja untuk jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara memiliki target sebesar 99 unit dan realisasi sebesar 99 unit, namun terjadi kesalahan teknis dalam proses pencairan.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu pendanaan yang tidak cukup, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi antar instansi yang lemah, birokrasi yang rumit, masalah infrastruktur, monitoring dan evaluasi yang lemah, dan perubahan kebijakan yang tidak terduga.

Upaya yang dilakukan adalah peningkatan alokasi anggaran, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi antar instansi, simplifikasi birokrasi, pengajuan nota dinas untuk penambahan anggaran pembangunan infrastruktur, menguatkan sistem pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program, penguatan sistem monitoring dan evaluasi dengan memperhatikan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dalam kerangka acuan kerja yang baru dalam APBD Pergeseran, dan konsistensi kebijakan dan regulasi.

Manfaat program ini adalah membantu mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta memperbaiki sistem administrasi, mengelola sumber daya dengan lebih efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah serta mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan di tingkat provinsi.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP		BB (78,80)	BB (80,26)	17.974.716.961	17.252.321.045		
	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penggangan, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	laporan/ dokumen	24	24	45.065.281	29.515.580		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	13.530.000	9.106.980	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	dokumen	3	3	4.500.000	4.200.000	Terdapat perubahan kebijakan dalam panggangan misal perubahan standar harga	Penyesuaian anggaran dengan perubahan kebijakan
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	dokumen	3	3	4.500.000	3.550.000	-	-

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	6	6	15.452.000	7.228.600	-	-
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	laporan	3	3	7.083.281	5.430.000	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	laporan/dokumen	35	35	15.770.867.814	15.151.048.456		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	100	100	15.754.757.814	15.148.048.456	Adanya peraturan terkait kenaikan tunjangan fungsional	Pengajuan nota dinas untuk penambahan anggaran gaji dan tunjangan pada APBD Perubahan
2	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	2	2	16.110.000	3.000.000	Penggunaan aplikasi SIPD penatausahaan yang belum bisa maksimal	Penggunaan aplikasi pendamping SIMDA FMIS

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	489.373.287	489.023.627		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	6	4	5.728.430	5.608.270	-	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	5	2	72.000.000	71.973.500	-	-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	700	850	15.050.000	15.047.000	-	-
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	12	12	15.094.857	14.894.857	-	-
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	dokumen	12	12	6.500.000	6.500.000	-	-

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	200	21	375.000.000	375.000.000	Beberapa acara rakor dan konsultasi tidak dapat diikuti secara langsung	Mengikuti acara rapat atau undangan secara virtual (<i>via zoom meeting</i>)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	23	13	39.728.500	36.197.000		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	23	22	39.728.500	36.197.000	Harga satuan 1 unit alat laboratorium ada yang melebihi harga satuan yang tercantum pada DPA	Pembatalan pengadaan 1 unit alat labor dan akan mengajukan kembali pada APBD Perubahan tahun berikutnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan	348	348	1.512.902.079	1.511.493.982		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	300	300	3.000.000	3.000.000	-	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	36	36	271.382.329	269.974.232	-	-

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12	1.238.519.750	1.238.519.750	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	unit	103	103	116.780.000	35.042.400		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	19 (16 unit pajak dan 8 unit service)	92.960.000	11.742.400	-	-
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	82	82	13.320.000	12.800.000	Peralatan dan mesin yang rusak tidak dapat diperbaiki	Memasukkan peralatan dan mesin yang tidak bisa diperbaiki ke dalam kelompok aset rusak dan menganggarkan pengadaan pada tahun berikutnya
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	2	10.500.000	10.500.000	-	-

PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ada 8 program. Capaian Kinerja Program/Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program perencanaan lingkungan hidup bertujuan untuk mengendalikan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup. Program ini didukung alokasi anggaran Rp0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,- (0%). Salah satu subkegiatan yang mendukung program ini pada tahun 2024 adalah subkegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Output yang dicapai dari subkegiatan ini adalah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD.

Program ini memiliki 2 indikator kinerja pada setiap kegiatan. 2 indikator tersebut realisasinya tidak tercapai sebagaimana yang dimaksud pada indikator kerja Kualitas perencanaan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan target sebesar 100% realisasi 75%; Jumlah dokumen KLHS RPJMD Provinsi Jambi yang terselenggara target 1 dokumen realisasi 0,75 dokumen. Subkegiatan penyusunan dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 baru mulai dilaksanakan pada awal November dengan menggunakan bantuan dana GCF. Sementara pembinaan KLHS kabupaten/kota tetap dilaksanakan secara online. Dalam pelaksanaan KLHS banyak mengalami kendala di antaranya :

- Pemahaman KLHS pada tingkat pengambil kebijakan masih rendah;
- Keterbatasan data dan informasi pendukung rekomendasi dalam KLHS;
- Sulitnya membentuk tim KLHS/Pokja KLHS karena sebagai tim *ad hoc* maka kegiatan ini tidak menjadi fokus kegiatan.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu pendanaan yang terbatas, konflik kepentingan, keterbatasan data dan informasi, kurangnya koordinasi antar instansi serta tumpang tindih kewenangan dan tugas.

Upaya yang dilakukan adalah mencari sumber pendanaan alternatif melalui skema pembiayaan berkelanjutan (BioCF & GCF), penyusunan kebijakan yang konsisten, meningkatkan koordinasi antar instansi, penyempurnaan data dan sistem informasi lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan.

Manfaat program ini adalah pengurangan dampak lingkungan negatif dari aktivitas manusia, seperti polusi udara, air dan tanah serta kerusakan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pelaksanaan program perencanaan lingkungan hidup tidak hanya berkontribusi pada kelestarian alam, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan, serta membangun ketahanan terhadap tantangan lingkungan dan perubahan iklim.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan adalah salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sangat beralasan karena indikator program (outcome) yang ingin dicapai dalam periode RENSTRA 2021-2026 adalah tersajinya data kondisi kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi secara keseluruhan yang meliputi aspek kualitas air, udara, air laut dan ekosistem gambut.

Program ini pada tahun 2024 disiapkan anggaran sebesar Rp550.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp521.133.286,- atau sebesar 94,75%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) Provinsi Jambi Tahun 2024, yang didukung oleh beberapa kegiatan. Nilai IKA dan IKU ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan bidang lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jambi maupun Perangkat Daerah terkait juga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan program di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perbaikan optimalisasi kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini, antara lain :

1. Pemantauan kualitas lingkungan dilaksanakan dalam bentuk pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas air (sungai Batanghari) sebanyak 2 kali di 6 kab/kota (16 titik), dan pemantauan kualitas udara ambien sebanyak 2 kali di 11 kab/kota (4 titik yaitu transportasi, industri/agro industri, pemukiman, dan perkantoran/komersial).

2. Kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup

Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilaksanakan dalam bentuk memberikan layanan pengujian kualitas air, udara dan tanah yang berasal dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, perseorangan dan akademika. Layanan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sasaran dari kegiatan UPTD laboratorium lingkungan ini menjadikan Laboratorium Lingkungan di Provinsi Jambi yang unggul dan profesional dalam layanan pengujian kualitas lingkungan bagi pengguna jasa dan mampu menyediakan data kualitas lingkungan di Provinsi Jambi guna mendukung sasaran strategi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Jumlah sampel uji yang masuk selama tahun 2024 sebanyak 1985 sampel, mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang hanya sebanyak 1.846 sampel, namun lebih kecil dari tahun 2022 sebanyak 3.452 sampel. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.025.385.100,- (202,54%). Realisasi tahun 2024 ini sudah memenuhi target Rp1.000.000.000,-, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2023 yang penerimaannya sebesar Rp2.325.415.745,- dan tahun 2022 yang penerimaannya sebesar Rp3.217.807.560,-.

Penurunan terjadi dikarenakan beberapa waktu lalu status akreditasi laboratorium lingkungan hidup masih dalam proses reakreditasi laboratorium lingkungan hidup yang akreditasinya dibekukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sehingga belum maksimal dalam penerimaan layanan pengujian sampel. Selain itu, terjadinya penundaan belanja yang bukan prioritas. Solusi dari permasalahan ini adalah pengajuan nota dinas untuk persetujuan belanja sesuai dengan Surat Edaran TAPD Provinsi Jambi.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran meliputi

- Pelaksanaan koordinasi pengendalian kabakaran lahan dan hutan
- Mengikuti rapat kerja teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2024
- Inventarisasi pemulihan lahan bekas terbakar (lahan gambut dan hutan) di Provinsi Jambi dilaksanakan di 6 kab/kota, yaitu Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim.

Wilayah yang memiliki dampak besar dengan adanya kerusakan gambut adalah Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim, karena ketiga wilayah ini memiliki luasan gambut yang besar.

Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah kesulitan memperoleh data dari kab/kota yang memiliki lahan gambut dan lahan bekas terbakar karena tidak tersedianya data di kab./kota tersebut. Inventarisasi lahan gambut dan lahan bekas terbakar telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan.

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar meliputi

- a. Pelaksanaan koordinasi pemulihan LAT di Kecamatan Pangkalan Bambu, Kabupaten Merangin. Hasil kegiatan ini Desa Tanjung Bungo Kec. Pangkalan Bambu mengajukan proposal pemulihan LAT ke KLHK RI.
- b. Pelaksanaan koordinasi/inventarisasi eksisting LAT (Lahan Akses Terbuka) di Kab. Tebo, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Bungo, dan Kab. Tebo. Semua memiliki potensi lahan akses terbuka akibat adanya aktivitas PETI dan galian C.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	poin	IKLH = 64,09 (IKU 84,42; IKA 61,19; IKAL 77,19; IKEG 73,89)	IKU 89,85; IKA 50,67; IKAL 81,67	550.000.000	521.133.286		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	titik	15	15	550.000.000	521.133.286		
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	laporan	4800	1985	550.000.000	521.133.286	a. Perubahan jadwal pelaksanaan audit/surveilen ISO oleh pihak KAN ke bulan Januari 2025, dimana semula dijadwalkan pada bulan November atau Desember. b. Selisih harga negosiasi dalam belanja bahan kimia dan belanja suku cadang alat laboratorium.	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	lokasi	10	10	0	0		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	dokumen	2	2	0	0	Tidak tersedianya data yang diminta ke kab/kota yang memiliki lahan gambut dan lahan bekas terbakar	1.) Melaksanakan sosialisasi pengendalian karhutla terhadap masyarakat dan usaha/kegiatan. 2.) Melakukan follow up terkait ketersediaan data
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	dokumen	2	2	0	0	-	-

c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Program ini didukung alokasi anggaran Rp0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,- (0%). Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) memiliki 1 Kegiatan yaitu Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. Program ini memiliki 1 indikator kinerja yang tercapai sesuai target.

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Pengelolaan B3 dan LB3 terhadap pelaku usaha dan kab/kota

Pelaksanaan pembinaan terhadap dunia/usaha transporter dan pengumpul Limbah B3 di wilayah Provinsi Jambi dilakukan terhadap 6 perusahaan. Tujuan kegiatan ini agar terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang menggunakan B3 dan limbah B3 dalam menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan diharapkan terkendalinya lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Jambi. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan 6 perusahaan tersebut sudah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan, yaitu 3 perusahaan pengumpul Limbah B3 (PT. Anggrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera dan PT. Surya Cipta Wisesa), dan 3 perusahaan pengangkut Limbah B3 (PT. Anggrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera, dan PT. Surya Cipta Wisesa).

2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Insenerator Limbah B3 Medis
3. Penandatanganan kesepakatan dan penyerahan asset berupa bangunan dan kendaraan antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan KLHK RI.

Program ini tidak memiliki anggaran, tetapi tetap harus dilaksanakan seperti pelaksanaan monev pengelolaan insenerator Limbah B3 Medis. Pelaksanaan kegiatan dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo melalui pengiriman laporan monev setiap bulannya.

Sementara itu, pengelolaan B3 dan LB3 terhadap pelaku usaha dan kab/kota dilakukan melalui verifikasi dokumen laporan oleh pelaku usaha dan kab/kota yang dikirim ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu pendanaan yang terbatas. Upaya yang dilakukan adalah mencari sumber pendanaan lain dengan menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan pihak swasta, meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dalam pengendalian B3 dan Limbah B3 serta instansi terkait.

Manfaat program ini adalah perlindungan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, pencegahan kontaminasi sumber daya alam, mengurangi risiko kecelakaan atau paparan berbahaya di tempat kerja,, mengurangi risiko bencana lingkungan, peningkatan reputasi perusahaan melalui kepatuhan terhadap standar pengelolaan B3 dan Limbah B3 (menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan).

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3	%	100	100	0	0		
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	perusahaan	5	6	0	0		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	dokumen	22	22	0	0	Tidak ada anggaran	-

d. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini didukung alokasi anggaran Rp 618,619,500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 579,845,161 (93,73%). Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) memiliki 1 Kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah.

Tujuan dari program ini adalah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga menurunnya beban pencemaran dari usaha/kegiatan yang dipantau atau diawasi dan mengetahui tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Fasilitasi penerbitan Surat Persetujuan Pertanyaan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 48 badan usaha (42 sudah selesai).
 2. Fasilitasi persetujuan teknis sebanyak 15 badan usaha (7 sudah selesai)
 3. Fasilitasi penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebanyak 5 badan usaha (4 sudah selesai)
- Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Hasil dari pembinaan dan pengawasan tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan berupa saran dan tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan mengevaluasi komitmen pemrakarsa terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

No.	Uraian	Target						Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	50	20	11	23	13	13	53	17	19	19	17	10
2.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang dibina (pendampingan)	-	-	-	-	-	-	-	9	2	1	18	-
3.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang taat	-	-	5	-	-	-	-	9	5	17	28	7

Sumber : Bidang Penataan, Tahun 2024

Jumlah perusahaan telah dilakukan pengawasan terhadap ketaatan dan pendampingan tahun 2024 sebanyak 10 badan usaha dari target 13 badan usaha (langsung), dimana yang taat sebanyak 7 badan usaha.

Program ini memiliki 1 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan target 77% dan realisasi sebesar 70%. Sementara itu indikator subkegiatan yang tidak tercapai yaitu jumlah perusahaan untuk pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan target 13 Perusahaan dan realisasi sebesar 10 badan usaha.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu pendanaan yang terbatas dalam pengawasan yang dilakukan tidak dapat menjangkau semua sektor atau area yang seharusnya dipantau secara intensif, kurangnya kendaraan operasional untuk ke lapangan, ketidaksesuaian antara izin dan implementasi di lapangan, dan banyak pelaku usaha atau pemegang izin yang kurang memahami pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban yang terkait izin lingkungan.

Upaya yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM (menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk aparat pembinaan dan pengawasan lingkungan), peningkatan kepatuhan pemegang izin terhadap regulasi lingkungan, memperkuat koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pengawasan lingkungan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas LH, serta aparat penegak hukum,

pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Manfaat program ini adalah peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, membantu pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan, mencegah bencana lingkungan, dan peningkatan pengelolaan limbah B3.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	76	70	618.619.500	579.845.161		
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan untuk pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	perusahaan	13	10	618.619.500	579.845.161		
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	dokumen	20	68	536.000.000	532.372.161	-	-
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	orang	15	15	5.350.000	4.970.000	Anggaran terbatas	PPLH mengikuti diklat secara mandiri

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	dokumen	13	10	77.269.500	42.503.000	Kurangnya komitmen dunia usaha terhadap izin lingkungan yang diberikan	Memberikan sanksi yang sesuai kepada kegiatan usaha yang terbukti lalai dalam mentaati izin lingkungan
---	---	---	---------	----	----	------------	------------	--	--

e. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Program ini didukung alokasi anggaran Rp 300,000,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 262,302,874 (87,43%). Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH memiliki 2 kegiatan yaitu Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH; dan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.

Program ini memiliki 1 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi dengan target sebesar 83% dan realisasi sebesar 79,49%; Sementara itu, indikator kegiatan yaitu Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui dengan target 36 MHA dan realisasi sebesar 31 MHA; Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi dengan target 36 Kelembagaan dan realisasi 31 Kelembagaan.

Subkegiatan yang mendukung program ini adalah

- Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH. Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi :
 - i) pengajuan draft Rancangan Pergub tentang pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) : 1 kali
 - ii) penyusunan laporan lokakarya dan laporan hasil akhir kajian penilaian manfaat non karbon bagi MHA : 1 kali

Pada tahun 2024 target inventarisasi keberadaan MHA dan Kearifan Lokal terealisasi 31 MHA dari target 36 MHA. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kesalahan dalam beberapa rincian anggaran sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi : pelaksanaan FPIC BSM di 30 lokasi, pelaksanaan FPIC lanjutan di 30 lokasi, pelaksanaan pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sebanyak 2 kali, pelaksanaan pelatihan ESMF sebanyak 2 kali. Program kegiatan ini cenderung memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengendalikan aktivitas/kegiatan masyarakat yang menimbulkan emisi karbon.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu kurangnya pengakuan hukum karena ketidaksesuaian antara hukum negara dan sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut, dan penyusunan kebijakan yang tidak inklusif menyebabkan kurangnya pemahaman tentang MHA di kalangan pihak berwenang,

Upaya yang dilakukan adalah memyusun kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat adat dengan memperhitungkan kearifan lokal, memberikan pendidikan dan penyuluhan untuk Masyarakat Adat, dialog dan kemitraan antara Pemerintah, Masyarkat Adat, dan sektor swasta, peningkatan kesadaran masyarakat dan Pemerintah tentang pentingnya MHA, pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat adat melalui pendidikan dan akses informasi yang lebih baik juga menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan hak-hak mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Manfaat program ini adalah pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	%	79	79	300.000.000	262.302.874		
	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	MHA	33	33	100.000.000	79.195.874		
1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	dokumen	11	11	100.000.000	79.195.874	Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga tim pelaksana tidak bisa menyelesaikan kegiatan di semua lokasi yang telah direncanakan.	-

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	Kelembagaan	33	33	200.000.000	183.107.000		
1	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	dokumen	8	8	200.000.000	183.107.000		

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini didukung alokasi anggaran Rp 210,000,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 201,925,165 (96,15%). Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat memiliki 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi. Program ini memiliki 1 indikator kinerja yang tercapai dengan realisasi sesuai dengan target (100%).

Subkegiatan yang mendukung program ini meliputi Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Pelaksanaan subkegiatan ini antara lain :

- Pembinaan dan penilaian Kampung Iklim
- Pembinaan dan penilaian Sekolah Adiwiyata
- Pembinaan Kalpataru
- Pembinaan Saka Kalpataru

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu keterbatasan tenaga penyuluh atau pendidik lingkungan yang terlatih, dan kurangnya anggaran

Upaya yang dilakukan adalah pendekatan yang lebih terintegrasi, di mana program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan harus relevan, dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara aktif dalam prosesnya. Sinergi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga sangat penting untuk menciptakan program yang berkelanjutan dan efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman lingkungan hidup.

Manfaat program ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu lingkungan, mengubah perilaku masyarakat untuk mengurangi dampak lingkungan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehingga menciptakan perubahan positif untuk lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini didukung alokasi anggaran Rp 167,380,500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 107,105,500 (63,99%). Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup memiliki 1 Kegiatan yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi.

Subkegiatan yang mendukung program ini meliputi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan. Pelaksanaan subkegiatan ini antara lain :

1. Jumlah kasus yang masuk ke pos pengaduan Dinas LH tahun 2024 sebanyak 7 kasus. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu 24 kasus dan tahun 2023 sebanyak 13 kasus. Kasus yang masuk telah 100% diselesaikan.
2. Kegiatan penataan hukum lingkungan telah dilaksanakan terhadap berbagai usaha/kegiatan yang dapat berakibat munculnya berbagai bentuk pencemaran lingkungan, sehingga diperlukan suatu usaha untuk menata dan melakukan penegakan hukum lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini merupakan usaha pemerintah untuk menata dan mengelola lingkungan dari berbagai bentuk pencemaran baik air, udara maupun pencemaran limbah B3 serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya meliputi penegakan hukum administratif, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Pada tahun 2024 ini, jumlah rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan (penegakan hukum), jumlah verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan LH dan pengaduan LH dilaksanakan terhadap 7 perkara. Realisasi kegiatan ini di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 11 perkara.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui mekanisme pengaduan lingkungan hidup atau bagaimana cara mengajukan pengaduan yang resmi, proses penanganan pengaduan sering terkendala karena keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personil maupun anggaran, kesulitan verifikasi fakta dan bukti terkait pengaduan sehingga menghambat proses

penyelidikan dan penanganan masalah yang diadukan, dan stigma atau ketakutan dari masyarakat untuk mengajukan pengaduan.

Upaya yang dilakukan adalah pembenahan dalam hal peningkatan sosialisasi mekanisme pengaduan, peningkatan kapasitas pengelola pengaduan, transparansi dalam tindak lanjut pengaduan, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu memperbaiki sistem informasi dan koordinasi antar instansi untuk memastikan bahwa setiap pengaduan dapat ditangani dengan efektif dan efisien.

Manfaat program ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan, pengawasan yang lebih efektif terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, dan perbaikan dalam kebijakan lingkungan.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	%	100	100	297.880.000	286.606.306		
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup	kasus	18	13	297.880.000	286.606.306		
		Terlaksananya penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup	kasus	18	24				
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	dokumen	18	13	173.640.000	164.000.680	1.) Masyarakat belum begitu memahami SOP pengaduan lingkungan, 2.) Budaya masyarakat yang merasa khawatir akan kerahasiaan identitas pengadu.	1.) Dinas LH akan kerjasama dengan diskominfo terkait aplikasi satu pintu yang dikembangkan yaitu SP4N Lapor, serta pembuatan dan penyebaran pamflet terkait SOP dan hotline pengaduan lingkungan, 2.) Pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pengaduan lingkungan.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	dokumen	18	24	124.240.000	122.605.626	1.) Rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan tidak sesuai dengan jadwal 2.) Adanya kasus yang tidak bisa langsung ditangani ke tingkat penyidikan	1.) Mempercepat persiapan bahan rapat tindak lanjut hasil pengawasan 2.) Pengajuan usulan untuk mengisi jabatan fungsional PPNS ke BKD
---	---	--	---------	----	----	-------------	-------------	--	---

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini didukung alokasi anggaran Rp 250,000,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp196,028,180,- (78,41%). Program Program Pengelolaan Persampahan memiliki 1 Kegiatan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang tercapai dengan target kinerja yaitu Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi tidak tercapai dengan target sebesar 70% dan realisasi 53,81%; dan indikator kegiatan : Jumlah penanganan sampah secara regional target sebesar 524,960 ton/tahun dan realisasi sebesar 172.768,62 ton/tahun.

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Pelaksanaan monitoring Jakstrada di 11 kab/kota dan Pembinaan kabupaten/kota terkait pengelolaan sampah (TPS3R)
2. Pelaksanaan Rapat Teknis PPKL se-Provinsi Jambi
3. Bimtek Pengelolaan Sampah untuk bank sampah dan TPS3R
4. Penilaian *green office* dalam rangka Hari Lingkungan Hidup sedunia

Target Jakstrada Provinsi Jambi untuk pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga tahun 2024 sebesar 26%, sedangkan target untuk penanganannya sebesar 72%. Realisasi pengurangan sampah Tahun 2024 sebesar 22% dan realisasi penanganan sampah sebesar 53,81%. Program ini dilaksanakan untuk membuka wawasan dan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah di Provinsi Jambi.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya pemilahan sampah dan dampak negatif sampah terhadap lingkungan, infrastruktur pengelolaan sampah di daerah yang tidak memadai, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan sampah serta keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengelolaan sampah

secara efektif, penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pengelolaan/peembuangan sampah di daerah masih lemah, dan banyak daerah yang belum memanfaatkan teknologi yang efisien dalam pengelolaan sampah.

Upaya yang dilakukan adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait dalam merancang solusi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, efisien, dan terintegrasi, termasuk investasi dalam infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan penegakan hukum dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik.

Manfaat program ini adalah peningkatan kualitas lingkungan dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pengurangan pencemaran lingkungan, pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA, pemanfaatan kembali sumber daya (daur ulang), dan pengurangan perubahan iklim.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan pengurangan timbunan sampah di Provinsi Jambi	%	26	22	250.000.000	196.028.180		
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan pengurangan sampah secara regional	ton/ tahun	183,738,86		250.000.000	196.028.180		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang disusun dan ditetapkan	dokumen	13	10	250.000.000	196.028.180	Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal).	Penyesuaian jadwal

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feedback* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan Tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup terlaksana sebesar 75%.
 - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 90,91%.
 - Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH terlaksana sebesar 95,77%.
 - Program pengelolaan persampahan terlaksana sebesar 76,87%.

- c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) terlaksana 100%.
 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat terlaksana sebesar 100%.
 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup terlaksana sebesar 100%.

d. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

- Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
 - ❖ Keterlambatan keluarnya pengesahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
 - ❖ Adanya perubahan-perubahan aturan terkait lingkungan hidup
 - ❖ Adanya rasionalisasi anggaran
- Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
 - ❖ Komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara lingkup DLH Provinsi Jambi untuk merealisasikan target output dan outcomes dengan dukungan anggaran.
 - ❖ Terlaksananya evaluasi dan pengendalian kegiatan dari pimpinan kepada bawahan lingkup DLH Provinsi Jambi.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, antara lain :

- Terselenggaranya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Penambahan anggaran pada perubahan menyebabkan waktu untuk melaksanakan program/kegiatan tidak cukup mengakibatkan target capaian kinerja program dan kegiatan tidak terlaksana sesuai perencanaan awal.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :

- Selalu mengupayakan adanya koordinasi dan komunikasi secara intensif antar semua komponen di Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan agar dapat berjalan dengan lebih baik.

- Mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM agar lebih kompeten sesuai tugas dan fungsinya untuk pencapaian output dan outcomes.
- Atasan langsung memantau/memonitor perkembangan kegiatan dan pencapaian target baik dari sisi penyerapan dana maupun kualitas sasaran kegiatannya dengan membuat agenda kerja untuk setiap pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan hasil kegiatan.

Adapun secara lebih rinci terkait dengan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja 2024 dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2025 tertuang dalam Tabel 3.

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

TABEL 3

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA DLH PROVINSI JAMBI S/D TAHUN 2024

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2024	
						Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (65)	B (65)	B (69,95)	B (63,5)	BB (78,75)	124,02%	B (64)	BB (78,75)	100%
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	123	laporan/dokumen	16	24	24	100%	25	65	53%
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	dokumen	4	4	4	100%	4	12	60%
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15	dokumen	3	3	3	100%	3	9	60%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15	dokumen	3	3	3	100%	3	9	60%
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15	dokumen	3	3	3	100%	3	9	60%
2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15	dokumen	3	3	3	100%	3	9	60%
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	laporan	7	6	6	100%	6	19	63%
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	laporan	1	2	2	100%	3	6	46%
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	175	laporan/ dokumen	35	35	35	100%	35	105	60%
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	orang/ bulan	101	103 orang (14 bulan)	103 orang (14 bulan)	100%	115	115	96%
2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 laporan	2	2	2	100%	2	6	60%
2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	25 dokumen	5	5	5	100%	5	15	60%
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	70 laporan	14	14	14	100%	14	42	60%
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	150 orang	28	51	49	96,08%	160	160	107%
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	680 -	0	0	0	0%	175	175	26%
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 orang	28	21	19	90%	4	51	268%
2.11.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175 orang	0	30	30	100%	35	65	37%
2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	310 orang	0	0	0	0%	65	65	0

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	100	100	100%	100	100	100%
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	paket	4	6	6	100%	10	20	40%
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	195	paket	2	5	5	100%	40	47	24%
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4800	orang	850	700	855	1	1000	2705	56%
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	paket	12	4	4	100%	12	28	47%
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dokumen	12	12	12	100%	12	36	60%
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	610	laporan	21	200	53	27%	200	274	45%
2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16	laporan	2	3	3	100%	3	8	50%
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9	dokumen	0	1	1	100%	2	3	33%
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	132	unit	13	23	22	96%	27	62	27%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11	unit	0	0	0	0%	3	3	27%
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	95	unit	0	0	0	0%	19	19	20%
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	unit	9	23	22	96%	4	35	175%
2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	unit	4	0	0	0%	1	5	83%
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1490	laporan	348	348	348	100%	298	994	67%
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1250	surat	300	300	300	100%	250	850	68%
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180	bulan	36	36	36	100%	36	108	60%
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	bulan	12	12	12	100%	12	36	60%
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	136	unit	103	99	99	100%	120	133	98%
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23	unit	0	0	0	0%	21	21	91%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	unit	19	16	16	100%	9	19	211%
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92	unit	82	82	82	100%	88	88	96%
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	unit	2	1	1	100%	2	5	42%
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100	%	100	100	100	100%	100	100	100%
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun	11	dokumen	1	0	0	0%	2	3	27%
2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	3	dokumen	1	0	0	0%	0	1	33%
2.11.02.1.01.0005	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi Jambi yang ditetapkan	1	dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%
2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	1	dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	8	dokumen	0	0	0	0%	2	2	25%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	24 dokumen	0	2	2	100%	7	9	38%
2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	5 dokumen	0	0	0	0%	1	1	20%
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD yang disusun	3 dokumen	0	2	2	100%	1	3	100%
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	3 dokumen	0	0	0	0%	1 dokumen (Peninjauan Kembali)	1	33%
2.11.02.1.02.0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun	15 dokumen	0	0	0	0%	4	4	27%
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	IKA : 61,59 poin IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKEG : 75,89		IKA : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKEG : 75,89	IKA : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKEG : 75,89		IKU : 84,62 IKA : 61,39 IKAL : 78,49 IKEG : 74,89		
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94 titik	24	30	30	100%	30	74	79%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	42 dokumen	12	12	12	100%	12	36	86%
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	30 dokumen	0	0	0	0%	6	6	20%
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut)	18 lokasi	0	0	0	0%	6	6	33,33%
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 dokumen	0	0	0	0%	1	1	50%
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	21840 dokumen	3452	4200	1846	43,95%	4680	9978	46%
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	10 lokasi	9	10	10	100%	10	33	330%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	60 dokumen	2	2	2	100%	12	16	27%
2.11.03.1.03.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	22 kegiatan	5	2	2	100%	4	11	50%
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanakeragaman hayati Provinsi Jambi	100% %	0	0	0	0%	100	100	100%
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	5 dokumen dokumen (Perda/ Pergub)	0	0	0	0%	1	1	100%
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	5 dokumen	0	0	0	0%	1	1	20%
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	18,5 Ha	0	0	0	0%	18,5	18,5	100%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	100%	%	5 dokumen	5	5	100%	100	100	100%
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	6	perusahaan	6	5	5	100%	5	6	100%
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	dokumen	0	0	0	0%	1	1	20%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	109	dokumen	5	22	22	100%	22	49	45%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	86% (60	%	0	76	80,00	105%	77	12	#VALUE!
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70	usaha/kegiatan	19	13	35	269	70	25	36%
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20	dokumen	27	13	20	154%	25	83	415%
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	15	orang	12	0	0	0%	15	86%	79%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	80	badan usaha	19	13	17	131%	70	33	41%
2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	33	dokumen	0	0	0	0%	11	11	33%
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	100%	64,28% (27 MHA)	76	79	79	100%	86	86	100%
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	42	MHA	30	33	33	100%	36	36	86%
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	55	dokumen	11	2	2	0	11	24	44%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	42	kelembagaan	30	33	33	0	36	36	86%
2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	42	dokumen	6	8	8	0	36	36	86%
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina	80	%	0	60	60	100%	70	70	88%
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	5	kali	0	4	4	100%	4	4	100%
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	58	dokumen	0	4	4	100%	22	26	45%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	525 orang	0	0	0	0%	100	100	19%
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	100% %	0%	0	0%	0%	100%	100%	100%
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	30 kategori	0	0	0	0%	6	6	20%
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	30 entitas	0	0	0	0%	6	6	20%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	100% %	100	100	100	100%	100%	100	100%
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	19 kasus	24	18	13	100%	17	54	100%
		Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	28 kasus	24	18	26	144%	23	73	100%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	85	pengaduan	24	18	13	100%	17	54	64%
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	133	perkara	24	18	26	144%	23	73	55%
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	37	perkara	0	0	0	0%	10	10	27%
2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	12	perkara	0	0	0	0%	4	4	33%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	30	%	22,00	27	22,00	81,48%	28%	22,00	73%
		Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi	70	%	68,67	73	68,67	94,07%	71%	68,67	98%
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pengurangan sampah secara regional	224.982,86	ton/tahun	51.891,65	194.621,85	51.891,65	26,66%	205.866,67	51.891,65	23%
		Jumlah penanganan sampah secara regional	524.960,00	ton/tahun	161.945,53	518.991,60	161.945,53	31,20%	522.019,05	161.945,53	31%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan	61 dokumen	8	4	4	100%	13	25	41%
2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional	Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	3 unit	0	0	0	0%	1	1	33%
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	8 dokumen	0	0	0	0%	2	2	25%
2.11.11.1.01.0006	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	524.960,00 ton	0	0	0	0%	522.019,05	522019,05	99%
2.11.11.1.01.0010	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	22 dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 pada misi 2, yaitu **“Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia”**. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai misi ke-5 RPJMD Provinsi Jambi selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah terwujudnya sumber lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut.
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik.

Tabel 4
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Capaian Setiap Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tujuan 3 RPJMD: Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial	Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73.71	73.92	74.13	74.34	74.56	74.56	
Sasaran 8 RPJMD: Meningkatkan kualitas lingkungan		Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut	1. Indeks Kualitas Udara (IKU)	77.71	78.01	78.31	78.61	78.91	78.91	
			2. Indeks Kualitas Air (IKA)	69.78	69.98	70.18	70.38	70.58	70.58	
			3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	73.05	73.12	73.19	73.26	73.33	73.33	
			4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	70.80	70.86	70.92	70.98	71.04	71.04	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	5. Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi Nilai AKIP)	BB (79)	BB (79.25)	BB (79.50)	BB (79.75)	A (80.00)	A (80.25)	
			6. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari laboratorium lingkungan	19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	
			7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.32	86.42	86.52	86.62	86.72	86.82	

Sumber : RENSTRA DLH Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Tabel 5
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	pojn	73.71	73.92	74.13	74.34	74.56	74.56	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	%	70	70	70	70	70	70	

Sumber : RENSTRA DLH Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Beban lingkungan di wilayah Provinsi Jambi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan semakin berat. Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus-menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan ini disebabkan beberapa isu lingkungan hidup strategis yang menonjol di wilayah Provinsi Jambi antara lain :

1. Pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah)
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI;
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
2. Perubahan iklim dan ketahanan lingkungan
3. Deforestasi dan restorasi lahan gambut
4. Kebijakan dan penegakan hukum lingkungan
 - a. Pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, seperti pembukaan lahan tanpa izin atau pencemaran industri, sering kali tidak ditindak tegas karena kurangnya koordinasi antar instansi dan aparat penegak hukum;
 - b. Masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.
5. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), seperti dari industri atau rumah sakit, sering tidak terkelola dengan baik dan berpotensi mencemari tanah, air dan udara.
6. Pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular
Jumlah sampah di kabupaten/kota terus meningkat, sementara pengelolaan sampah yang efektif dan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (seperti daur ulang) masih terbatas.

7. Kehilangan keanekaragaman hayati

Hilangnya habitat alam akibat deforestasi dan aktivitas manusia menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Jambi memiliki spesies endemik yang terancam punah.

Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang masing-masing lembaga dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif. Penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pandangan, harapan dan permasalahan yang ada harus mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan RKPD Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2026. Pelaksanaan program dan kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2026 lebih dititikberatkan pada pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan upaya-upaya untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola lingkungan yang meliputi Penyusunan dan Penetapan RPPLH dan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKLHD).
2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan yang meliputi Penyusunan KLHS.
3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien, air sungai, danau, air laut, ekosistem gambut, koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor LH, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan,

- identifikasi lahan bekas terbakar dan lahan gambut, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian LB3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R, meliputi penyusunan rencana pengelolaan sampah Regional, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional, dan penyusunan dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
 5. Penegakan hukum lingkungan hidup, meliputi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, peningkatan kapasitas PPLHD di Provinsi Jambi, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
 6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH, meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH; pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH; dan penyuluhan dan kampanye LH; Pembinaan dan penilaian ADIPURA, Kalpataru, Kampung Iklim, Adiwiyata, dan PROPER.
 7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan meliputi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan, pelayanan pos pengaduan lingkungan serta pendayagunaan laboratorium lingkungan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

dengan hasil pencapaian target tahunan. Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Selain itu, rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, subkegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya sesuai dengan Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Usulan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renja DLH Provinsi Jambi senantiasa diselaraskan dengan Renstra DLH Provinsi Jambi dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perbandingan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2026 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan terdapat perbedaan yang signifikan pada program kegiatan serta target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Namun, tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi OPD. Perbedaan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

TABEL 6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
PROVINSI JAMBI

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan
			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				30.930.000.000				19.626.415.261	
I	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				22.000.000.000	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			17.725.860.374	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik		Predikat AKIP PD (opsi Nilai AKIP)	BB (79,25) Predikat	22.000.000.000	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Predikat AKIP PD (opsi Nilai AKIP)	BB (79,25) Predikat	17.725.860.374	
			Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	85.60 Poin			Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	85.60 Poin		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.42 Poin			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.42 Poin		

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

			Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Laboratorium Lingkungan	2,5 M Rupiah			Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Laboratorium Lingkungan	2,5 M Rupiah		
I.1	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		310.000.000	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		91.941.500	
1	2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	100.000.000	2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	64.402.600	
2	2.11.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	30.000.000	2.11.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	
3	2.11.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	30.000.000	2.11.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	
4	2.11.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	50.000.000	2.11.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	9.517.650	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

5	2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	100.000.000	2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	12.021.250	
1.2	2.11.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	16.130.000.000	2.11.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%	15.802.145.829	
1	2.11.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 orang	16.000.000.000	2.11.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 orang	15.797.145.829	
2	2.11.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	45.000.000	2.11.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	0	
3	2.11.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	20.000.000	2.11.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	0	
4	2.11.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	35.000.000	2.11.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	0	
5	2.11.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000	2.11.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.000.000	
6	2.11.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 dokumen	5.000.000	2.11.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 dokumen	0	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

I.3	2.11.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya penatausahaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		25.000.000	2.11.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	
1	2.11.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	25.000.000	2.11.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	0	
I.4	2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah		310.000.000	2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah		100.882.835	
1	2.11.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150 paket	120.000.000	2.11.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150 paket	100.882.835	
2	2.11.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	40.000.000	2.11.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	0	
3	2.11.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Jambi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	150.000.000	2.11.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	0	
I.5	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah		670.000.000	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah		239.662.738	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

1	2.11.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	25.000.000	2.11.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	11.073.540	
2	2.11.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	80.000.000	2.11.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	31.140.280	
3	2.11.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	350 paket	40.000.000	2.11.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	350 paket	30.550.000	
4	2.11.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	30.000.000	2.11.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12.457.918	
5	2.11.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 dokumen	25.000.000	2.11.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.000.000	
6	2.11.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	400.000.000	2.11.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	150.441.000	
7	2.11.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	20.000.000	2.11.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	0	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

8	2.11.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	50.000.000	2.11.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	0
I.6	2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		0	2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		0
1	2.11.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Jambi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0	2.11.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0
2	2.11.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	0	2.11.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	0
3	2.11.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	2.11.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0
4	2.11.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	2.11.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0
I.7	2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.610.000.000	2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.253.447.472

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

1	2.11.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10.000.000	2.11.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000	
2	2.11.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	300.000.000	2.11.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	398.331.672	
3	2.11.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.300.000.000	2.11.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	854.115.800	
I.8	2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		445.000.000	2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		237.780.000	
1	2.11.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 unit	225.000.000	2.11.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 unit	146.790.000	
2	2.11.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	175.000.000	2.11.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	39.990.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

3	2.11.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	45.000.000	2.11.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	51.000.000	
4	2.11.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	0	2.11.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	0	
I.9	2.11.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD		Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD		2.500.000.000	2.11.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD		0	
1	2.11.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Provinsi Jambi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.500.000.000	2.11.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	0	
II	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				400.000.000	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			40.839.400	
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100 %	400.000.000	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100 %	40.839.400	
II.1	2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		0	2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		0	
1	2.11.02.1.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	0 dokumen	0	2.11.02.1.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	0 dokumen	0	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2	2.11.02.1.01.0006 - Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Provinsi Jambi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	0 dokumen	0	2.11.02.1.01.0006 - Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	0 dokumen	0	
II.2	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		400.000.000	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		40.839.400	
1	2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Provinsi yang Disusun	0 dokumen	0	2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Provinsi yang Disusun	0 dokumen	0	
2	2.11.02.1.02.0008 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	11 dokumen	200.000.000	2.11.02.1.02.0008 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	11 dokumen	0	
3	2.11.02.1.02.0009 - Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/ Kota	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/ kota	11 dokumen	200.000.000	2.11.02.1.02.0009 - Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/ kota	11 dokumen	40.839.400	
III	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				4.050.000.000	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			884.031.287	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air	69.98	Poin	4.050.000.000	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	69.98	Poin	884.031.287
			Indeks Kualitas Udara	78.01	Poin		Indeks Kualitas Udara	78.01	Poin		
			Persentase penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	100%	%		Persentase penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	100%	%		
			Persentase penyelesaian inventarisasi pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	100%	%		Persentase penyelesaian inventarisasi pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	100%	%		
			Persentase penyelesaian pengujian di laboratorium lingkungan	100%	%		Persentase penyelesaian pengujian di laboratorium lingkungan	100%	%		
III.1	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			3.000.000.000	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			833.865.287

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.03.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	250.000.000	2.11.03.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	0
2.11.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 dokumen	400.000.000	2.11.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 dokumen	0
2.11.03.1.01.0004 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Provinsi Jambi	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	118 paket	400.000.000	2.11.03.1.01.0004 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	118 paket	0
2.11.03.1.01.0008 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Provinsi Jambi	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 laporan	50.000.000	2.11.03.1.01.0008 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 laporan	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Provinsi Jambi	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	118 lokasi	150.000.000	2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	118 lokasi	49.074.700	
2.11.03.1.01.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Provinsi Jambi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 kegiatan	250.000.000	2.11.03.1.01.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 kegiatan	0	
2.11.03.1.01.0011 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 dokumen	200.000.000	2.11.03.1.01.0011 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 dokumen	0	
2.11.03.1.01.0012 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	100.000.000	2.11.03.1.01.0012 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	0	
2.11.03.1.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	1 unit	500.000.000	2.11.03.1.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	1 unit	0	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

	2.11.03.1.01.0014 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	1 unit	300.000.000	2.11.03.1.01.0014 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	1 unit	0
	2.11.03.1.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	480 dokumen	250.000.000	2.11.03.1.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	480 dokumen	784.790.587
	2.11.03.1.01.0018 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	200.000.000	2.11.03.1.01.0018 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	0
III.2	2.11.03.1.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Terlaksananya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		1.000.000.000	2.11.03.1.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		50.166.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

1	2.11.03.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	4 dokumen	400.000.000	2.11.03.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	4 dokumen	25.077.800	
2	2.11.03.1.03.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	Provinsi Jambi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	2 kegiatan	500.000.000	2.11.03.1.03.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	2 kegiatan	25.088.200	
3	2.11.03.1.03.0015 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	100.000.000	2.11.03.1.03.0015 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	0	
IV	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				100.000.000	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			0	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase RTH	7 %	100.000.000	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	7 %	0	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

IV.1	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi		100.000.000	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi		0	
1	2.11.04.1.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0 dokumen	0	2.11.04.1.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0 dokumen	0	
2	2.11.04.1.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Provinsi Jambi	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	0 Ha	0	2.11.04.1.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	0 Ha	0	
3	2.11.04.1.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Provinsi Jambi	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 orang	0	2.11.04.1.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 orang	0	
4	2.11.04.1.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Provinsi Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0 unit	0	2.11.04.1.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0 unit	0	
5	2.11.04.1.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Provinsi Jambi	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 unit	100.000.000	2.11.04.1.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 unit	0	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

V	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				475.000.000	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			87.984.000				
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	20	%	475.000.000	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	20	%	87.984.000	
			Indeks Resiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 skala Provinsi Jambi (poin)	3.5	poin				Indeks Resiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 skala Provinsi Jambi (poin)	3.5	poin		
V.1	2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Terlaksananya pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			475.000.000	2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Terlaksananya pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			87.984.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

	2.11.05.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	12	dokumen	275.000.000	2.11.05.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	12	dokumen	87.984.000
	2.11.05.1.01.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Provinsi Jambi	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	0	dokumen	0	2.11.05.1.01.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	0	dokumen	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

	2.11.05.1.01.0004 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	6	200.000.000	2.11.05.1.01.0004 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	6	0	
VI.	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				1.305.000.000	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			725.911.000	
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	40	%	1.305.000.000	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	40	%	725.911.000
			Persentase pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH (%)	100	%		Persentase pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH (%)	100	%	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

VI.1	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		1.305.000.000	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		725.911.000	
	2.11.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	400.000.000	2.11.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	665.911.000	
	2.11.06.1.01.0005 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	30 orang	300.000.000	2.11.06.1.01.0005 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	30 orang	0	
	2.11.06.1.01.0007 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2 orang	80.000.000	2.11.06.1.01.0007 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2 orang	0	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

	2.11.06.1.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75	badan usaha	525.000.000	2.11.06.1.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75	badan usaha	60.000.000
VII	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					500.000.000	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				0
	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	20	%	500.000.000	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	20	%	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

VII. 1	2.11.07.1.01 - Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Terlaksananya identifikasi Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		150.000.000	2.11.07.1.01 - Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya identifikasi Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		0	
	2.11.07.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 dokumen	150.000.000	2.11.07.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 dokumen	0	
VII. 2	2.11.07.1.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		350.000.000	2.11.07.1.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		0	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

	2.11.07.1.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	11 dokumen	350.000.000	2.11.07.1.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	11 dokumen	0	
VIII	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				450.000.000	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			14.357.200	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100 %	450.000.000	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100 %	14.357.200	
			Persentase peningkatan pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH utk masyarakat (%)	100 %			Persentase peningkatan pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH utk masyarakat (%)	100 %		
VIII. 1	2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		450.000.000	2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		14.357.200	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

	2.11.08.1.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	50 orang	50.000.000	2.11.08.1.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	50 orang	0	
	2.11.08.1.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komun itas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	4 lembaga	300.000.000	2.11.08.1.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komun itas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	4 lembaga	0	
	2.11.08.1.01.0007 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2 dokumen	100.000.000	2.11.08.1.01.0007 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2 dokumen	14.357.200	
IX	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				300.000.000	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			0	
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	20 %	300.000.000	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	20 %	0	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

IX.1	2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		300.000.000	2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		0	
	2.11.09.1.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantr ophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	300.000.000	2.11.09.1.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantr ophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	0	
X	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				600.000.000	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			120.932.000	
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100 %	600.000.000	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100 %	120.932.000	
X.1	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		600.000.000	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		120.932.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

	2.11.10.1.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	12 perkara	200.000.000	2.11.10.1.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	12 perkara	0	
	2.11.10.1.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ ditangani	18 pengaduan	200.000.000	2.11.10.1.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ ditangani	18 pengaduan	60.000.000	
	2.11.10.1.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	26 perkara	150.000.000	2.11.10.1.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	26 perkara	60.932.000	
	2.11.10.1.01.0012 - Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	20 orang	50.000.000	2.11.10.1.01.0012 - Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	20 orang	0	
XI	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				750.000.000	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			26.500.000	
	Meningkatnya tata kelola persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	55	750.000.000	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	55	26.500.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

XI.1	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST		750.000.000	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST		26.500.000	
1	2.11.11.1.01.0002 - Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Provinsi Jambi	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	0 ton	0	2.11.11.1.01.0002 - Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	0 ton	0	
2	2.11.11.1.01.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Provinsi Jambi	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	0 unit	0	2.11.11.1.01.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	0 unit	0	
3	2.11.11.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	0 dokumen	0	2.11.11.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	0 dokumen	0	
4	2.11.11.1.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	0 unit	0	2.11.11.1.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	0 unit	0	
5	2.11.11.1.01.0009 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 dokumen	300.000.000	2.11.11.1.01.0009 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 dokumen	0	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

6	2.11.11.1.01.0010 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Provinsi Jambi	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	0 dokumen	0	2.11.11.1.01.0010 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	0 dokumen	0	
7	2.11.11.1.01.0011 - Pengelolaan sampah Regional	Provinsi Jambi	Jumlah sampah regional yang dikelola	0 ton	0	2.11.11.1.01.0011 - Pengelolaan sampah Regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	0 ton	0	
8	2.11.11.1.01.0012 - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Provinsi Jambi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	0 unit	0	2.11.11.1.01.0012 - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	0 unit	0	
9	2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	11 dokumen	450.000.000	2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	11 dokumen	26.500.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat kabupaten yang ditindaklanjuti sampai dengan tingkat Provinsi, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan lingkungan hidup sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat belum tertuang dalam rancangan awal rencana kerja karena masih akan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas Nasional yang terkait dengan bidang lingkungan hidup adalah Prioritas Nasional ke-2 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syari'ah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 yang terkait dengan bidang lingkungan hidup adalah sasaran ke-6 yaitu terwujudnya transformasi ekonomi hijau, dengan 2 (dua) indikator, antara lain:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 memiliki tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema ini menjadi landasan untuk mewujudkan delapan prioritas nasional sesuai visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Tema dan PN tersebut direfleksikan dalam sasaran utama RKP tahun 2026 yang dirancang guna menjaga kesinambungan pembangunan nasional sekaligus mendorong percepatan transformasi. Kesinambungan itu tercermin dalam upaya mencapai sasaran pembangunan tahun 2026 yang didasarkan pada masing-masing pilar Trisula Pembangunan, dan diterjemahkan dalam target indikator terukur.

Beberapa sasaran pembangunan tahun 2026 mencakup :

1. Pilar pertumbuhan tinggi berkelanjutan mencakup pertumbuhan ekonomi 5,8-6,3 persen, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 37,14 persen, *Gross National Income* (GNI) per kapita 5.870 per dolar Amerika Serikat (AS), serta indeks kualitas lingkungan hidup 76,67.

2. Pilar penurunan kemiskinan, ditargetkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,44-4,96, serta rasio gini 0,377-0,380.
3. Pilar sumber daya manusia berkualitas, indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,57.

Pertumbuhan ekonomi regional juga ditargetkan untuk Kawasan Barat Indonesia sekitar 6,1 persen, dan Kawasan Timur mencapai 7,1 persen. Sasaran-sasaran ini dirancang sebagai bagian dari pilar pembangunan yang selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045.

Tema RKP Tahun 2026 dijabarkan ke dalam 8 Prioritas Nasional (PN) yang menjadi kerangka utama pembangunan tahun 2026, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
 - Fokus: Ketahanan pangan, energi, hilirisasi industri, pembangunan kawasan dan desa, serta penguatan koperasi dan UMKM.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - Fokus: Pengembangan wilayah 3T, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), konektivitas antarwilayah, dan urbanisasi yang terkendali.
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
 - Fokus: Akses dan mutu pendidikan, transformasi digital di sektor pendidikan, serta kesehatan dasar termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - Fokus: Penguatan nilai Pancasila, kebudayaan nasional, gotong royong, dan etika publik.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - o Fokus: Infrastruktur dasar (jalan, air, sanitasi), rumah layak huni (program 3 juta rumah), SPAM, pengelolaan sampah, dan infrastruktur konektivitas.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
 - o Fokus: Emisi GRK, ekonomi sirkular, pengelolaan sumber daya air, dan kebencanaan.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
 - o Fokus: Reformasi birokrasi, transformasi digital pelayanan publik, keamanan nasional, dan supremasi hukum.
8. Transformasi Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif dan Responsif
 - o Fokus: Pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel dan berbasis digital.

Selain 8 (delapan) PN di atas, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 5 program prioritas utama sebagai turunan dari tema pembangunan 2026, yaitu:

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan Nasional
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan 3 Juta Rumah
5. Pengelolaan Sampah Nasional Terintegrasi

Semua prioritas nasional di atas diarahkan untuk mendukung tema besar RKP 2026, yaitu "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Kebijakan fiskal dan program kementerian/lembaga akan disusun mengacu pada prioritas nasional tersebut, dan menjadi dasar pengalokasian APBN 2026.

Sasaran pembangunan nasional yang berhubungan dengan lingkungan hidup ada dalam Prioritas Nasional (PN) 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Sedangkan program prioritas utama adalah pengelolaan sampah nasional terintegrasi.

Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang terkait dengan KLHK, yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi : 4,8 – 5,4%
2. Tingkat Kemiskinan : 6,5 – 7,08%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka : 4,2 – 4,4%
4. Indeks Gini : 0,314 -0,,32
5. Indeks Modal Manusia : 0,56
6. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca : 80,76%

Dikaitkan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2026, yaitu :

1. Pembangunan Ekonomi yang Progresif, Inklusif dan Berkelanjutan, dengan prioritas pembangunan, yaitu :
 - a. Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon;
 - b. Pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif dan koperasi sektor produksi;
 - c. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan;
 - d. Meningkatkan investasi daerah;
 - e. Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan;
 - f. Pengembangan ekosistem pekerjaan hijau serta pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau.

2. Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang Merata dan Berkeadilan, dengan prioritas pembangunan :
 - a. Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan;
 - b. Pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas pemuda serta pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak;
 - d. Meningkatkan kapasitas inovasi daerah;
 - e. Optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter.
3. Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah, dengan prioritas pembangunan :
 - a. Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur dasar;
 - b. Penguatan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang logistik daerah;
 - c. Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak;
 - d. Penanganan permukiman kumuh.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Demokratis, dengan prioritas pembangunan :
 - a. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi;
 - b. Penerapan manajemen resiko;
 - c. Peningkatan kualitas ASN berbasis merit;
 - d. Optimalisasi pendapatan daerah;
 - e. Peningkatan partisipatif aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah.
5. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dengan prioritas pembangunan :
 - a. Meningkatkan kolaborasi dalam pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana;
 - b. Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas;
 - c. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

- d. Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing”. Tema ini ditetapkan sebagai bagian dari penyusunan tahun pertama RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029. Rencana penetapan tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 diterjemahkan ke dalam Prioritas-Prioritas Pembangunan Daerah yang nantinya dijadikan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan-kebijakan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 serta diimplementasikan ke dalam APBD Tahun 2026. Isu-isu strategis yang menjadi arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026, antara lain:

1. Optimalisasi produktivitas ekonomi
2. Penguatan rantai komoditas unggulan
3. Pemerataan kualitas sumber daya manusia
4. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan demokratis
5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sasaran dan Target Indikatif RKPD 2026, antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi: 4,8 % – 5,4 %
- Angka kemiskinan: turun ke 6,25 % – 6,76 %
- Pengangguran terbuka: 4,2 % – 4,4 %
- Indeks Gini: 0,314 – 0,320
- Indeks Modal Manusia: sekitar 0,56
- Penurunan intensitas gas rumah kaca: hingga 77 % – 79 % dari baseline

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sejalan dengan visi Pemerintahan Provinsi Jambi periode 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT”**, maka disusunlah misi pembangunan Provinsi Jambi yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran, yaitu :

- 1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
- 3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Misi pembangunan yang selaras dengan urusan bidang Lingkungan Hidup adalah misi ke-3.

Tujuan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi periode 2025-2029 dan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan”.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terdiri dari 2 (dua), yaitu :

- **Sasaran 1** “ Meningkatkan kualitas udara, air, lahan dan air laut”

Indikator Kinerja Sasaran terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)
2. Indeks Kualitas Air (IKA)
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
4. Indeks Kualitas Air laut (IKAL)

- **Sasaran 2** “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik”

Indikator Kinerja Sasaran terdiri dari :

1. Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi Nilai AKIP)
2. Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari laboratorium lingkungan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Capaian Setiap Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tujuan 3 RPJMD: Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial	Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73.71	73.92	74.13	74.34	74.56	74.56	
Sasaran 8 RPJMD: Meningkatkan kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut	1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	77.71	78.01	78.31	78.61	78.91	78.91	
		2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	69.78	69.98	70.18	70.38	70.58	70.58	
		3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	73.05	73.12	73.19	73.26	73.33	73.33	
		4.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	70.80	70.86	70.92	70.98	71.04	71.04	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik		5.	Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi Nilai AKIP)	BB (79)	BB (79.25)	BB (79.50)	BB (79.75)	A (80.00)	A (80.25)	
		6.	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari laboratorium lingkungan	19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	
		7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.32	86.42	86.52	86.62	86.72	86.82	

Sinergi antara prioritas pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, selanjutnya diuraikan pada arah kebijakan yang dipakai dalam perencanaan strategis di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola lingkungan yang meliputi Penyusunan dan Penetapan RPPLH, Penerapan RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, Peninjauan kembali RPPLH Provinsi Jambi, Pengintegrasian RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, penetapan baku mutu kelas air level Provinsi, penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PPRKD) serta penyusunan

- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DPKLHD).
2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan yang meliputi Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jambi, Penyusunan KLHS Tata Ruang, Penyusunan KLHS KRP dan Peninjauan kembali RZWP3K Provinsi Jambi.
 3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien, air sungai, danau, air laut, ekosistem gambut, koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor LH, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, identifikasi lahan bekas terbakar dan lahan gambut, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian LB3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
 4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R, meliputi penyusunan rencana pengelolaan sampah Regional, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional, dan penyusunan dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
 5. Penegakan hukum lingkungan hidup, meliputi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, peningkatan kapasitas PPLHD di Provinsi Jambi, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
 6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH, meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,

Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH; pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH; dan penyuluhan dan kampanye LH; Pembinaan dan penilaian ADIPURA, Kalpataru, Kampung Iklim, Adiwiyata, dan PROPER.

7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan meliputi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan, pelayanan pos pengaduan lingkungan serta pendayagunaan laboratorium lingkungan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Hasil evaluasi kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup perlu menaikkan anggarannya agar upaya pengelolaan lingkungan hidup bisa lebih baik lagi. Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar Rp20.070.716.961,- (dua puluh milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung (1 subkegiatan rutin) sebesar Rp15.754.757.814,- dan Belanja Langsung sebesar Rp4.315.959.147,- untuk mendanai untuk mendanai 7 Program (1 program rutin dan 6 program urusan LH), 13 kegiatan (6 kegiatan rutin dan 7 kegiatan urusan LH), 30 subkegiatan (20 subkegiatan rutin dan 10 subkegiatan urusan LH). Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp19.120.661.211,- (sembilan belas milyar seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah) atau 95,27% dengan sisa dana sebesar Rp950.055.750,- (sembilan ratus lima puluh juta lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.000.000.000,- dan realisasi per 31 Desember sebesar Rp2.098.266.600,- (209,83%).

Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

dinas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil untuk pencapaian target yang telah ditetapkan DLH Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2026
- b. Menyusun tahapan kegiatan/anggaran
- c. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada Tahun 2026 ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi direncanakan akan melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program 14 (empat belas) kegiatan 32 sub kegiatan, dengan rincian yaitu 1 (satu) program 6 (enam) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan merupakan non urusan, sedangkan 7 (tujuh) program 8 (delapan) kegiatan 12 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan merupakan urusan bidang lingkungan hidup. Program prioritas ini dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Jambi serta tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Rencana kerja (program/kegiatan) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2026 seperti tercantum dalam Tabel 8 berikut ini :

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

TABEL 8
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 BESERTA PROYEKSI MAJU TAHUN 2027
PROVINSI JAMBI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30.930.000.000				34.876.000.000
2.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				30.930.000.000				34.876.000.000
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				22.000.000.000				23.935.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik		Predikat AKIP PD (opsi Nilai AKIP)	BB (79,25)	22.000.000.000	APBD		BB (79,50)	23.935.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

			Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD	85.60 Poin		APBD		85.70 Poin	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.42 Poin		APBD		86.52 Poin	
			Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Laboratorium Lingkungan	2,5 M Rupiah		APBD		2,85 M Rupiah	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		310.000.000	APBD			310.000.000
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	100.000.000	APBD		4 dokumen	100.000.000
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	30.000.000			3 dokumen	30.000.000
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	30.000.000	APBD		3 dokumen	30.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	50.000.000	APBD		6 laporan	50.000.000
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	100.000.000	APBD		4 laporan	100.000.000
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	16.130.000.000	APBD		100 %	17.130.000.000
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 orang	16.000.000.000	APBD		102 orang	17.000.000.000
2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	45.000.000			12 dokumen	45.000.000
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	20.000.000	APBD		12 dokumen	20.000.000
2.11.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	35.000.000	APBD		12 dokumen	35.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.01.1.02.0005	2.11.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000	APBD		1 laporan	25.000.000
2.11.01.1.03.0006	2.11.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 dokumen	5.000.000	APBD		3 dokumen	5.000.000
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya penatausahaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		25.000.000			100 %	25.000.000
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	25.000.000	APBD		2 laporan	25.000.000
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		310.000.000	APBD		40 paket	310.000.000
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 paket	120.000.000	APBD		150 paket	120.000.000
2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	40.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.01.1.06.0006	2.11.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Jambi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	150.000.000	APBD		20 orang	150.000.000
2.11.01.1.06	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah		670.000.000			30 laporan	700.000.000
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	25.000.000	APBD		4 laporan	25.000.000
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	80.000.000	APBD		2 paket	85.000.000
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	350 paket	40.000.000	APBD		350 paket	40.000.000
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	30.000.000	APBD		12 paket	30.000.000
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	25.000.000	APBD		12 dokumen	25.000.000
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	400.000.000	APBD		12 laporan	425.000.000
2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	20.000.000	APBD		2 dokumen	20.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	50.000.000
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah						200.000.000
2.11.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Jambi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0	APBD		0 unit	0
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	0	APBD		2 paket	50.000.000
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	APBD		6 unit	150.000.000
2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	APBD		0 unit	0
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.610.000.000	APBD			1.710.000.000
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10.000.000	APBD		12 laporan	10.000.000
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	300.000.000	APBD		12 laporan	350.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.300.000.000	APBD		12 laporan	1.350.000.000
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		445.000.000				700.000.000
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 unit	225.000.000	APBD		14 unit	225.000.000
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	175.000.000	APBD		6 unit	175.000.000
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	45.000.000	APBD		20 unit	50.000.000
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	0	APBD		1 unit	250.000.000
2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD		2.500.000.000				2.850.000.000
2.11.01.1.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Provinsi Jambi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.500.000.000	APBD		1 unit kerja	2.850.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				400.000.000				950.000.000
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100 %	400.000.000				950.000.000
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		0				300.000.000
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	0 dokumen	0	APBD		1 dokumen	100.000.000
2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Provinsi Jambi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	0 dokumen	0	APBD		1 dokumen	200.000.000
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		400.000.000				650.000.000
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	0 dokumen	0	APBD		1 dokumen	250.000.000
2.11.02.1.02.0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	11 dokumen	200.000.000	APBD		11 dokumen	200.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/ kota	11 dokumen	200.000.000	APBD		11 dokumen	200.000.000		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				4.050.000.000				4.535.000.000		
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air	69.98 Poin	4.050.000.000			70.18 Poin	4.535.000.000		
			Indeks Kualitas Udara	78.01 Poin				78.31 Poin			
			Persentase penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	100%		%				100%	%
			Persentase penyelesaian inventarisasi pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	100%		%				100%	%
			Persentase penyelesaian pengujian di laboratorium lingkungan	100%		%				100%	%
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		3.000.000.000				3.485.000.000		

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	250.000.000	APBD		4 dokumen	350.000.000
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 dokumen	400.000.000	APBD		6 dokumen	400.000.000
2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Provinsi Jambi	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	118 paket	400.000.000	APBD		118 paket	400.000.000
2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Provinsi Jambi	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 laporan	50.000.000	APBD		1 laporan	60.000.000
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Provinsi Jambi	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	118 lokasi	150.000.000	APBD		118 lokasi	400.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.03.1.01.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Provinsi Jambi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 kegiatan	250.000.000	APBD		1 kegiatan	275.000.000
2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 dokumen	200.000.000	APBD		1 dokumen	200.000.000
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
2.11.03.1.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	1 unit	500.000.000	APBD		1 unit	500.000.000
2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	1 unit	300.000.000	APBD		1 unit	315.000.000
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	480 dokumen	250.000.000	APBD		500 dokumen	285.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.03.1.01.0018	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	200.000.000	APBD		1 dokumen	200.000.000
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Terlaksananya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		1.000.000.000				1.050.000.000
2.11.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	4 dokumen	400.000.000	APBD		2 dokumen	450.000.000
2.11.03.1.03.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	Provinsi Jambi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	2 kegiatan	500.000.000	APBD		2 kegiatan	500.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.03.1.03.0015	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				100.000.000				500.000.000
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase RTH	7 %	100.000.000			10 %	500.000.000
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi		100.000.000				500.000.000
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0 dokumen	0	APBD		1 dokumen	300.000.000
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Provinsi Jambi	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	0 Ha	0	APBD		0 Ha	0
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Provinsi Jambi	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 orang	0	APBD		5 orang	100.000.000
2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Provinsi Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0 unit	0	APBD		0 unit	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Provinsi Jambi	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 unit	100.000.000	APBD		1 unit	100.000.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				475.000.000				525.000.000
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	20 %	475.000.000			20 %	525.000.000
			Indeks Resiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 skala Provinsi Jambi (poin)	3.5 poin				3.5 poin	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Terlaksananya pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		475.000.000	APBD			525.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewangannya	12 dokumen	275.000.000	APBD		12 dokumen	300.000.000
2.11.05.1.01.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Provinsi Jambi	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	0 dokumen	0	APBD		0 dokumen	0
2.11.05.1.01.0004	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	6	200.000.000	APBD		6	225.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				1.305.000.000			70%	1.731.000.000
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	40 %	1.305.000.000			35 %	1.731.000.000
			Persentase pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH (%)	100 %				100 %	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		1.305.000.000	APBD			1.731.000.000
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	400.000.000	APBD		20 dokumen	400.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	30 orang	300.000.000	APBD		30 orang	420.000.000
2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2 orang	80.000.000	APBD		2 orang	80.000.000
2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75 badan usaha	525.000.000	APBD		badan usaha	831.000.000
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				500.000.000				500.000.000
	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	20 %	500.000.000			20 %	500.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Terlaksananya identifikasi Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		150.000.000				150.000.000
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 dokumen	150.000.000	APBD		11 dokumen	150.000.000
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		350.000.000				350.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	11 dokumen	350.000.000	APBD		11 dokumen	350.000.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				450.000.000				450.000.000
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100 %	450.000.000			100 %	450.000.000
			Persentase peningkatan pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH utk masyarakat (%)	100 %				100 %	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		450.000.000				450.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	50 orang	50.000.000	APBD		50 orang	50.000.000
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	4 lembaga	300.000.000	APBD		4 lembaga	300.000.000
2.11.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2 dokumen	100.000.000	APBD		2 dokumen	100.000.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				300.000.000				300.000.000
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	20 %	300.000.000			20 %	300.000.000
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		300.000.000				300.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	300.000.000	APBD		5 entitas	300.000.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				600.000.000				600.000.000
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100 %	600.000.000			100 %	600.000.000
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		600.000.000				600.000.000
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	12 perkara	200.000.000	APBD		12 perkara	200.000.000
2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	18 pengaduan	200.000.000	APBD		19 pengaduan	200.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.10.1.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	26 perkara	150.000.000	APBD		26 perkara	150.000.000
2.11.10.1.01.0012	Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	20 orang	50.000.000	APBD		20 orang	50.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				750.000.000				850.000.000
	Meningkatnya tata kelola persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	55 poin	750.000.000			55 poin	850.000.000
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST		750.000.000				850.000.000
2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Provinsi Jambi	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	0 ton	0	APBD		0 ton	0
2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Provinsi Jambi	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	0 unit	0	APBD		0 unit	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	0 dokumen	0	APBD		2 dokumen	100.000.000
2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	0 unit	0	APBD		0 unit	0
2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 dokumen	300.000.000	APBD		1 dokumen	300.000.000
2.11.11.1.01.0010	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Provinsi Jambi	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	0 dokumen	0	APBD		0 dokumen	0
2.11.11.1.01.0011	Pengelolaan sampah Regional	Provinsi Jambi	Jumlah sampah regional yang dikelola	0 ton	0	APBD		0 ton	0
2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Provinsi Jambi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	0 unit	0	APBD		0 unit	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	11 dokumen	450.000.000	APBD		11 dokumen	450.000.000
-------------------	--	----------------	---	------------	-------------	------	--	------------	-------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Dinas Lingkungan Hidup merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Lingkungan Hidup ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2026 didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD dan Bank Dunia (Bio CF). Hasil perhitungan kebutuhan anggaran akan ditetapkan sesuai hasil pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, maka tersusunlah rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

TABEL 9
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2026

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			19.626.415.261
I	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP PD (opsi Nilai AKIP)	BB Predikat (79,25)	17.725.860.374
		Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	85.60 Poin	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.42 Poin	
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Laboratorium Lingkungan	2,5 M Rupiah	
I.1	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		91.941.500
1	2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	64.402.600
2	2.11.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	3.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

3	2.11.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	3.000.000
4	2.11.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	9.517.650
5	2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	12.021.250
I.2	2.11.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan administrasi keuangan perangkat daerah		15.802.145.829
1	2.11.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 orang	15.797.145.829
2	2.11.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	0
3	2.11.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	0
4	2.11.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	0
5	2.11.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

6	2.11.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 dokumen	0
I.3	2.11.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0
1	2.11.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	0
I.4	2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100.882.835
1	2.11.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 paket	100.882.835
2	2.11.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	0
3	2.11.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	0
I.5	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah		239.662.738
1	2.11.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	11.073.540
2	2.11.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	31.140.280
3	2.11.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	350 paket	30.550.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

4	2.11.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12.457.918
5	2.11.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.000.000
6	2.11.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	150.441.000
7	2.11.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	0
8	2.11.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	0
I.6	2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		0
1	2.11.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0
2	2.11.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	0
3	2.11.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0
4	2.11.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0
I.7	2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.253.447.472

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

1	2.11.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	1.000.000
2	2.11.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	398.331.672
3	2.11.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	854.115.800
I.8	2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			237.780.000
1	2.11.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14	unit	146.790.000
2	2.11.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	unit	39.990.000
3	2.11.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	unit	51.000.000
4	2.11.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	unit	0
I.9	2.11.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD			0
1	2.11.01.1.10 .0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	unit kerja	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

II	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	%	40.839.400
II.1	2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			0
1	2.11.02.1.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	0	dokumen	0
2	2.11.02.1.01.0006 - Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	0	dokumen	0
II.2	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			40.839.400
1	2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Provinsi yang Disusun	0	dokumen	0
2	2.11.02.1.02.0008 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	11	dokumen	0
3	2.11.02.1.02.0009 - Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	11	dokumen	40.839.400
III	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	69.98	Poin	884.031.287
		Indeks Kualitas Udara	78.01	Poin	

		Persentase penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	100%	%	
		Persentase penyelesaian inventarisasi pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	100%	%	
		Persentase penyelesaian pengujian di laboratorium lingkungan	100%	%	
III.1	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			833.865.287
1	2.11.03.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4	dokumen	0
2	2.11.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6	dokumen	0
3	2.11.03.1.01.0004 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	118	paket	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

4	2.11.03.1.01.0008 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 laporan	0
5	2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	118 lokasi	49.074.700
6	2.11.03.1.01.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 kegiatan	0
7	2.11.03.1.01.0011 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 dokumen	0
8	2.11.03.1.01.0012 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	0
9	2.11.03.1.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	1 unit	0
10	2.11.03.1.01.0014 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	1 unit	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

11	2.11.03.1.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	480 dokumen	784.790.587
12	2.11.03.1.01.0018 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	0
III.2	2.11.03.1.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		50.166.000
1	2.11.03.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	4 dokumen	25.077.800
2	2.11.03.1.03.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	2 kegiatan	25.088.200
3	2.11.03.1.03.0015 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

IV	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	7	%	0
IV.1	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi			0
1	2.11.04.1.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0	dokumen	0
2	2.11.04.1.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	0	Ha	0
3	2.11.04.1.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	orang	0
4	2.11.04.1.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0	unit	0
5	2.11.04.1.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1	unit	0
V	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	20	%	87.984.000
		Indeks Resiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 skala Provinsi Jambi (poin)	3.5	poin	
V.1	2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			87.984.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

1	2.11.05.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	12	dokumen	87.984.000
2	2.11.05.1.01.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	0	dokumen	0
3	2.11.05.1.01.0004 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	6		0
VI.	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	40	%	725.911.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

		Persentase pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH (%)	100	%	
VI.1	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			725.911.000
1	2.11.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20	dokumen	665.911.000
2	2.11.06.1.01.0005 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	30	orang	0
3	2.11.06.1.01.0007 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2	orang	0
4	2.11.06.1.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75	badan usaha	60.000.000
VII	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	20	%	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

VII.1	2.11.07.1.01 - Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya identifikasi Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		0
1	2.11.07.1.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 dokumen	0
VII.2	2.11.07.1.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		0
1	2.11.07.1.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	11 dokumen	0
VIII	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100 %	14.357.200

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

	MASYARAKAT	Persentase peningkatan pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH utk masyarakat (%)	100 %	
VIII.1	2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		14.357.200
1	2.11.08.1.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	50 orang	0
2	2.11.08.1.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	4 lembaga	0
3	2.11.08.1.01.0007 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2 dokumen	14.357.200
IX	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	20 %	0
IX.1	2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

1	2.11.09.1.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	0
X	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100 %	120.932.000
X.1	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		120.932.000
1	2.11.10.1.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	12 perkara	0
2	2.11.10.1.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ ditangani	18 pengaduan	60.000.000
3	2.11.10.1.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	26 perkara	60.932.000
4	2.11.10.1.01.0012 - Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	20 orang	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

XI	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	55	poin	26.500.000
XI.1	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST			26.500.000
1	2.11.11.1.01.0002 - Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	0	ton	0
2	2.11.11.1.01.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	0	unit	0
3	2.11.11.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	0	dokumen	0
4	2.11.11.1.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	0	unit	0
5	2.11.11.1.01.0009 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1	dokumen	0
6	2.11.11.1.01.0010 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	0	dokumen	0
7	2.11.11.1.01.0011 - Pengelolaan sampah Regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	0	ton	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

8	2.11.11.1.01.0012 - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	0 unit	0
9	2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	11 dokumen	26.500.000

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026. Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 mempedomani Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan lingkungan hidup yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Lingkungan Hidup.

Semoga Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : Juni 2025

KEPALA DINAS,

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660105 200012 1 002